

**PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA
(1906 – 1949) DAN PEMBENTUKAN
RADIKALISME ISLAM**

Oleh:

Otoman

*Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Raden Fatah Palembang*

Abstracts:

Al-Banna said: "We will not sit back and feel happy or stopped while the Qur'an has not really become institutionalization of the country. We will live to achieve this goal or die from it". In political thought, Hasan al-Banna linking faith with political activity. Surely a Muslim is not perfect keislamannya unless he became a politician, who had the foresight and give full attention to the issue of race. In his view, the Islamic one should lead to give attention to the problems of the nation. Islam is a comprehensive system, covering all aspects of life. Then it is the state and the homeland or the government, people, moral, strength, or compassion and fairness, insight and law, or science and law, material and natural wealth or income and wealth, as well as jihad and da'wa or troops and thought. As well as he is pure and true faith, no less no more. The scope of Islam itself is not possible not to touch the political sphere and the state. It is also associated with the rule in Islam itself that regulate the affairs that require power as executing.

Keywords: *Politic thought, Ikhwanul Muslimin (IM), radicalism.*

A. Pendahuluan

Ikhwanul Muslimin, selanjutnya disingkat IM adalah sebuah organisasi pergerakan Islam kontemporer yang besar. Organisasi ini tersebar di kurang lebih 70 negara, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di wilayah lainnya. Organisasi ini didirikan oleh Hasan Al-Banna (1324-1368 H/ 1906-1949 M) di Mesir, pada bulan April 1928. Organisasi ini menyeru untuk kembali kepada Islam, sebagaimana terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah, yang mengajak untuk menerapkan syari'at Islam dalam realitas kehidupan, mengembalikan kejayaan Islam dan berdiri menentang arus sekularisasi di kawasan Arab dan dunia Islam.¹

Dalam Anggaran Dasar (AD) IM disebutkan, bahwa tujuan gerakan organisasi ini adalah melakukan dakwah Islam yang benar, menyatukan umat Islam, menjaga kekayaan negara untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan sosial serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tujuan lain IM adalah membebaskan seluruh negeri Arab dan Islam dari kekuasaan asing, mendorong Liga Arab dan Pan Islamisme, membentuk negara yang melaksanakan semua hukum dan ajaran Islam seutuhnya dan mendukung kerjasama internasional untuk melindungi hak dan kebebasan serta berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dan mengembangkan peradaban kemanusiaan yang baru.²

Sedangkan agenda gerakan yang dilakukan IM meliputi, gerakan dakwah melalui media massa, mempersiapkan delegasi dan utusan ke dalam dan luar negeri, mendidik anggota sesuai dengan

¹Fathi Yakan, "Revolusi" *Hasan Al-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Qutb sampai Rasyid Al-Ghannusyiy*, terj. Fauzun Jamal dan Alimin, (Bandung: Harakah, 2002), h. 12-13.

²Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu Jilid I dan II*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 247-248

sistem dan prinsip IM, mengupayakan terwujudnya aturan-aturan publik yang lebih islami, mendirikan lembaga-lembaga sosial, ekonomi, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan lembaga-lembaga *amr ma'ruf nahy munkar*.³

Pada mulanya, organisasi ini sangat menarik perhatian golongan rendah yang serba kekurangan, tetapi lambat laun gerakan ini menyebar juga ke kalangan kaum intelektual dan beberapa pemimpin yang berpengaruh. Al-Banna sendiri bukan hanya seorang orator ulung, tetapi juga seorang organisator yang berhasil.⁴

Gerakan IM memulai langkahnya dari Provinsi Ismailiah, kemudian kantor pusatnya pindah ke kota Kairo dan berkembang ke sebagian besar daerah di Mesir. Pada akhir tahun empat puluhan, jumlah cabang IM mencapai 3000 buah yang mempunyai banyak sekali anggota. Kemudian gerakan IM menyebar dan tertanam kuat di negeri-negeri Arab di Sekitar Mesir, seperti Syiria, Palestina, Yordania, Libanon, Irak, Yaman, Sudan dan lain-lain. Gerakan ini juga mempunyai banyak sekali pengikut di pelbagai belahan pelosok dunia. Dalam tulisan ini akan dibahas Pemikiran Politik Hasan Al-Banna dan kaitannya dengan pembentukkan "Radikalisme Islam". Adapun lingkup bahasan ini adalah biografi Hasan Al-Banna, sejarah Singkat Ikhwanul Muslimin (IM), pemikiran IM dan kaitannya dengan "radikalisme Islam", serta beberapa pemikiran politik Al-Banna.

³*Ibid.*, h. 248-249.

⁴George Lenczowski, *Timur Tengah di Kancah Dunia*, terj. Asgar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), h. 309.

B. Biografi Hasan Al-Banna

Hasan Al-Banna dilahirkan pada tahun 1906 M, di sebuah desa bernama Al-Mahmudiyyah, yang masuk wilayah Al-Buhairah. Ayahnya seorang yang cukup terkenal dan memiliki sejumlah peninggalan ilmiah seperti *Al-Fathurrabbani Fi Tartib Musnad Al-Imam Ahmad Asy-Syaibani*, ia adalah Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna yang lebih dikenal dengan *As-Sa'ati*.⁵

Al-Banna memulai pendidikannya di *Madrasah Ar-Rasyad Ad-Diniyyah* dengan menghafal Alqur`an dan sebagian hadis-hadis Nabi serta dasar-dasar ilmu bahasa Arab, di bawah bimbingan *Asy-Syaikh Zahran* seorang pengikut tarekat *Shufi Al-Hashafiyah*. Al-Banna sangat terkesan dengan sifat gurunya yang mendidik, sehingga ketika *Asy-Syaikh Zahran* menyerahkan kepemimpinan madrasah itu kepada orang lain, Hasan Al-Banna pun ikut meninggalkan madrasah. Selanjutnya ia masuk ke *Madrasah I'dadiyyah* di Mahmudiyyah, setelah berjanji kepada ayahnya untuk menyelesaikan hafalan Alqur`annya di rumah. Tahun ketiga di madrasah inilah awal perkenalannya dengan gerakan-gerakan dakwah melalui sebuah organisasi yang *Jum'iyatul Akhlaq Al-Adabiyyah*, yang dibentuk oleh guru matematika di madrasah tersebut, bahkan Al-Banna sendiri terpilih sebagai ketuanya.

Aktivitasnya terus berlanjut hingga ia bergabung dengan organisasi *Man'ul Muharramat*. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di *Madrasah Al-Mu'allimin Al-Ula* di kota Damanhur. Di sinilah ia berkenalan dengan tarekat *Shufi Al-Hashafiyah*. Ia terkagum-kagum dengan majelis dzikir dan lantunan nasyid yang didendangkan secara bersamaan oleh pengikut tarekat tersebut.

⁵Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 7.

Lebih tercengang lagi ketika ia dapati bahwa di antara pengikut tarekat tersebut ada guru lamanya yang ia kagumi, *Asy-Syaikh Zahran*. Akhirnya Al-Banna bergabung dengan tarekat tersebut. Sehingga ia pun aktif dan rutin mengamalkan dzikir-dzikir *Ar-Ruzuqiyyah* pagi dan petang hari. Tidak ketinggalan, perayaan maulud Nabi pun rutin ia ikuti. Di antara aktivitas selama bergabung dengan tarekat ini ialah pergi bersama teman-teman se-tarikat ke kuburan, untuk mengingatkan mereka tentang kematian dan *hisab* (perhitungan amal). Mereka duduk di depan kuburan yang masih terbuka, bahkan salah seorang dari mereka terkadang masuk ke liang kubur tersebut dan berbaring di dalamnya agar lebih menghayati hakekat kematian nanti. Al-Banna terus bergabung dengan tarekat tersebut sampai pada akhirnya ia berbai'at kepada *syaiikh* tarekat saat itu yaitu *Asy-Syaikh* Basyuni Abd Al- Jabir Rizq.⁶

Sepeninggal Basyuni, Al-Banna berbai'at kepada *asy-Syaikh* Abdul Wahhab Al-Hashafi, pengganti pendiri tarekat tersebut. Ia diberi ijazah wirid-wirid tarekat tersebut. Al-Banna pernah mengungkapkan: "Dan saya berteman dengan saudara-saudara dari tarekat *Al-Hashafiyyah* di Damanhur. Saya rutin mengikuti acara *al-hadhrah* di Masjid Taubah setiap malam. Sayyid Abdul Wahhab-pun datang, dialah yang memberikan ijazah di kelompok tarekat *Hashafiyyah Syadziliyyah*, dan saya mendapat ajaran tarekat ini darinya. Ia juga memberi saya wirid dan amalan tarekat itu".

Karena faktor tertentu, akhirnya kelompok tarekat ini mendirikan sebuah organisasi yang bernama *Jum'iyah Al-Hashafiyyah Al-Khairiyyah* dan diketuai oleh teman lamanya, Ahmad As-Sukkari. Sementara itu, Hasan Al-Banna menjadi sekretarisnya

⁶*Ibid.*, h. 9

dan ia mengatakan: “Di saat-saat ini, nampak pada kami untuk mendirikan organisasi perbaikan yaitu *Al-Jum’iyyah Al-Hashafiyah Al-Khairiyah*, dan aku terpilih sebagai sekretarisnya... Lalu dalam perjuangan ini, aku menggantikannya dengan organisasi Ikhwanul Muslimin”.⁷ Setelah itu Al-Banna menghabiskan waktunya di *madrasah Al-Mu’allimin* dari tahun 1920-1923 M. Di sela-sela masa itu, ia juga banyak membaca majalah *Al-Manar* yang diterbitkan oleh Muhammad Rasyid Ridha, salah seorang tokoh gerakan *Ishlahiyyah* yang banyak dipengaruhi pemikiran Mu’ta-zilah. Di sisi lain, ia pun suka mendatangi *Asy-Syaikh* Muhibbuddin Al-Khathib di perpustakaan salafinya. Al-Banna, ketika ingin melanjutkan pendidikannya ke *Darul Ulum*, sempat bimbang antara melanjutkan atau menekuni dakwah dan amal. Ini dikarenakan interaksinya dengan buku *Ihya’ Ulumuddin*. Namun bermodalkan nasehat dari salah seorang gurunya, ia mantap untuk melanjutkan pendidikan. Ia akhirnya memutuskan melanjutkan pendidikannya di *Darul Ulum*. Di sini, ia sangat giat membentuk *jamaah-jamaah* dakwah, sehingga di tengah-tengah aktivitasnya tercetus dalam benaknya, ide untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang duduk di warung kopi dan berada di desa-desa terpencil untuk mendakwahi mereka. Pada akhirnya Al-Banna lulus dari *Darul Ulum* pada tahun 1927M. Usai pendidikannya di *Darul Ulum*, ia diangkat menjadi guru di daerah Al-Isma’iliyyah. Ia pun mengajar di sekolah dasar selama 19 tahun. Sebelumnya, ia datang ke daerah itu pada tanggal 19 September 1927 dan tinggal di sana selama 40 hari untuk mempelajari seluk-beluk lingkungan tersebut. Ternyata, ia dapati banyak terjadi perselisihan di antara masyarakat, sementara ia

⁷*Ibid.*, h. 12

berkehendak agar dapat berkomunikasi, bergaul dengan semua pihak, dan mempersatukannya.

C. Sejarah Singkat Ikhwanul Muslimin (IM)

Lahir dan berkembangnya IM tidak dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan oleh Al-Banna. Sosialisasi di kalangan masyarakat awam dijalankannya dengan gigih, hingga pada bulan April 1928 M, telah terbentuk bibit pertama IM. Pada tahun 1932 Al-Banna pindah ke Kairo, seiring dengan perpindahan gerakan IM bersamanya. Pada tahun 1941 terbentuk formatur di dalam gerakan untuk merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (*hai'ah ta' sisah*) yang pertama bagi IM.

Pada tahun 1933 M, gerakan ini mulai menerbitkan tabloid mingguan *Ikhwanul Muslimin* di mana Muhibuddin Al-Khatib (1303-1389 H/ 1886-1969 M) dipilih menjadi pemimpin redaksinya. Kemudian setelah itu terbit pula *An-Nazir* pada tahun 1357 H/ 1938 M, lalu *Asy-Syihab* pada tahun 1367 H/ 1947 M. Demikianlah secara silih berganti majalah-majalah dan koran-koran IM diterbitkan.⁸

Pada akhir Perang Dunia II, IM telah memiliki sejumlah besar pengikut dengan 5000 kader aktif. Bahkan pengaruhnya menembus ke luar Mesir.⁹ Pada tahun 1948 IM ikut serta dalam peperangan Palestina. Mereka memasuki medan pertempuran dengan membawa pasukan-pasukan khusus. Pada tanggal 8 November 1948, Perdana Menteri Mesir saat itu, Fahmi Naqrasyi, mengeluarkan keputusan prihal pembubaran organisasi IM. Kemudian pemerintah menyita kekayaan organisasi itu dan mencekal para pemimpin terkemukanya. Pembubaran ini dilakukan menyusul keterlibatan

⁸Fathi Yakan, "Revolusi" Hasan Al-Banna, h. 14-15

⁹George Lenczowski, *Timur Tengah di Kancah Dunia*, h. 309

Ikhwan dalam aksi pemogokan dan demonstrasi anti pemerintah dan anti asing. Aksi massa ini muncul akibat kesenjangan ekonomi yang makin parah yang dipicu oleh inflasi, produksi pertanian yang tidak seimbang dan meledaknya angka pengangguran. Dalam aksi demonstrasi yang diprakarsai Ikhwan ini, terjadi pembunuhan Jenderal Salim Zaki Pasha, kepala kepolisian Kairo.¹⁰

Keputusan pembubaran ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pendukung Ikhwan yang berbuntut pembunuhan An-Naqrasyi pada bulan Desember 1948. IM dituduh oleh pemerintah sebagai dalang pembunuhan tersebut. Ketegangan antara pemerintah dengan IM semakin memuncak, dan pada tanggal 12 Februari 1949, Al-Banna dibunuh oleh sekelompok pemuda tidak dikenal. Muncul dugaan, pemerintah ada di balik pembunuhan ini, karena pemerintah tidak serius menemukan pelakunya.¹¹

Kabinet selanjutnya, Kabinet An-Nuhas membebaskan organisasi Ikhwan tahun 1950 M berdasarkan keputusan Majelis Tinggi Negara yang menetapkan bahwa pembubaran organisasi IM tidak sah. Pada tahun 1950 M, Hasan Al-Hudaibi (1306-1393 H/ 1891-1973 M) dipilih menjadi *mursyid 'am* (pimpinan umum) organisasi ini. Dia merupakan salah seorang tokoh besar dalam dunia peradilan Mesir dan sering masuk-keluar penjara. Pada tahun 1954, dia dijatuhi hukuman seumur hidup, dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1971.

Pada bulan Oktober 1951 M, ketegangan antara Inggris dan Mesir makin memuncak, sehingga IM mengadakan grilya melawan Inggris di Terusan Suez. Pasukan Inggris, baik kelompok maupun perorangan menjadi sasaran penembak jitu dari para grilyawan yang

¹⁰*Ibid.*, h. 309-310

¹¹*Ibid.*

diorganisasikan oleh Ikhwanul Muslimin Maupun Partai Sosialis. Inggris membalas serangan ini dan terjadilah pertempuran sengit di kota Ismailiah selama enam hari. Kekerasan ini merambat ke Kairo dengan terjadinya kerusuhan massal yang menghancurkan kota Kairo.¹²

Pada tanggal 23 Juli 1952 M perwira-perwira Mesir di bawah pimpinan Mohammad Najieb melakukan sebuah kudeta militer yang dikenal dengan nama Revolusi Juli. Kudeta yang dimotori “Komite Perwira Bebas” ini berhasil menumbangkan kekuasaan Raja Farouk. Revolusi yang bertujuan membebaskan Mesir dari imperialisme dan feodalisme serta agar Mesir diperintah oleh penguasa yang jujur, yang mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan ekonomi serta mengembalikan harga diri bangsa Mesir, hal itu tentu mendapat dukungan dari IM. Namun IM setelah itu menolak ikut serta dalam pemerintahan, karena mereka mempunyai tujuan yang berlainan dalam revolusi. Akan tetapi, Jamal Abdul Naser yang kemudian menjadi penguasa tetap bersikeras mengatakan, bahwa penolakan itu merupakan pengingkaran atas piagam revolusi.

Kedua pihak tersebut (Militer versus Ikhwan) memasuki masa-masa perselisihan dan permusuhan. Pemerintah bermaksud untuk membungkam kekuatan IM, karena ia adalah saingan politik yang berbahaya. Maka Pemerintah melakukan penahanan terhadap aktivis-aktivis Ikhwan pada tahun 1954 dan mengasingkan ribuan anggota mereka. Dalam waktu satu bulan, sebanyak 450 anggota Ikhwan ditahan termasuk mursyid Ikhwan, Hasan Hudaibi serta 6 dari 14 anggota Komite Sentral (*lajnah markaziyyah*). Ada dua alasan

¹²Fathi Yakan, “Revolusi” *Hasan Al-Banna*, h. 18

yang dikemukakan pemerintah dalam penahanan ini, pertama IM dianggap berambisi untuk merebut kekuasaan, karena organisasi ini menekankan perlunya suatu negara Islam yang berdasarkan Alqur'an sebagai satu-satunya sumber hukum. Kedua, mereka dituduh mengancam nyawa Abdul Naser melalui upaya pembunuhan di alun-alun Al-Mansyiah di Iskandariah. Karena alasan kedua ini, enam orang dari anggota Ikhwan dijatuhi hukuman mati. Mereka adalah, Abdul Qadir 'Audah, Muhammad Farghalli, Yusuf Tal'at, Handawi Duwair, Ibrahim At-Taib, dan Mahmud Abdul Latif.¹³

Semenjak terbunuhnya Al-Banna tahun 1949, IM ditekan oleh rezim Naser pada tahun 1954-1955 dan juga tahun 1965. Hal ini berakibat terjadinya perpecahan di kalangan Ikhwan antara kelompok moderat yang mayoritas dipimpin oleh Hasan Hudaibi dengan Ikhwan militan di bawah pimpinan Sayyid Qutb. Kelompok pertama ingin menjauhkan diri dari segala bentuk kekerasan, sementara kelompok militan menghendaki penggunaan cara-cara kekerasan untuk melakukan perlawanan.¹⁴ Maka pada tahun 1965-1966 M, bentrokan terjai lagi antara IM dan pemerintah, karena kelompok terakhir IM ini melakukan operasi penahanan dan penganiayaan. Kali ini tiga orang dari Ikhwan dijatuhi hukuman mati, yaitu Sayyid Qutb, Yusuf Hawwas dan Abdul Fattah Ismail.¹⁵ Selama 10 tahun IM beroperasi secara rahasia sampai wafatnya Presiden Abdul Naser pada 28 Februari 1970 M.

Pada masa presiden Anwar Sadat organisasi IM memperoleh

¹³George Lenczowski, *Timur Tengah di Kancah Dunia*, h. 317-318

¹⁴George Lenczowsk, h. 231 lihat juga Fathi Yakan, "Revolusi" *Hasan Al-Banna*, h. 16-17.

¹⁵Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 18.

pembebasan dalam beberapa tahap. Umar Talmasani yang terpilih sebagai *mursyid 'am* setelah Hasan Hudaibi mengajukan permohonan akan hak-hak kelompok secara penuh, dan pengembalian seluruh aset-aset yang disita pemerintah dalam masa pemerintahan Abdul Naser.¹⁶ Meskipun cap ilegal masih belum dilepaskan dan keputusan penyitaan aset-aset organisasi dan pembubaran belum dicabut, IM aktif kembali. Pengganti Jamal Abdul naser ini memerlukan legitimasi bagi kekuasaannya dan membutuhkan dukungan politik yang lebih besar. Pelepasan para aktifis Ikhwan dari penjara maupun kamp-kamp tahanan dimaksudkan oleh Sadat sebagai cara untuk memperoleh dukungan dari kekuatan Islam guna melawan sisa-sisa pendukung Naser.¹⁷

Pada masa kemesraan IM dengan Sadat inilah Mesir mendapatkan kemenangan melawan Israel pada perang Oktober 1973. Dalam perang ini, peran sukarelawan Ikhwan sangat signifikan. Pasca perang 1973 IM memperoleh berbagai konsesi antara lain dengan diizinkan *Jama'ah Islamiyah* (JI) sebagai satu-satunya organisasi yang boleh hidup di kampus. Jama'ah Islamiyah kemudian melakukan berbagai aksi penguatan gerakan Islam dengan menyelenggarakan berbagai forum dakwah di bawah bimbingan para tokoh Ikhwan. Dalam situasi kuatnya dukungan pemerintah terhadap mereka, JI semakin menunjukkan dominasinya dalam kehidupan kampus dan di luar kampus. Mereka menuntut penerapan Syariat Islam di kampus, semisal pemisahan kelas bagi laki-laki dan perempuan, shalat berjama'ah tepat waktu, pelarangan perayaan hari-hari besar selain hari besar Islam dan sebagainya. Mereka juga menghancurkan toko-toko penjual televisi dan radio,

¹⁶Fathi Yakan, "*Revolusi*" *Hasan Al-Banna*, h. 16-18.

¹⁷*Ibid.*, h. 18.

memerankan diri sebagai polisi syariat dengan menakut-nakuti warga dan menghukum orang yang tidak berpuasa bulan Ramadhan. Puncak dari aksi kelompok ini adalah kudeta atas Akademi Teknik Militer pada 1974 yang didalangi oleh Faksi Salih Siriah dan Hizbut Tahrir Islamiyah. Juga pembunuhan atas Syekh Zahabi pada 1976.

Dua kasus kekerasan ini menyebabkan titik balik hubungan Ikhwan dengan rezim Sadat. Pada masa-masa selanjutnya hubungan kedua pihak ini semakin tegang. Para tokoh Ikhwan semakin berani mengkritik pemerintah Sadat dan sistem politik serta kebijakan politiknya, khususnya perdamaianya dengan Israel dalam Perjanjian Kamp David 1978. Dalam rentang waktu 1978 hingga 1981 II mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan oposisi Islam. Maraknya perlawanan politik kaum oposisi Islam ini mendorong Sadat melakukan penangkapan dan pemenjaraan atas 2000 orang, ratusan dosen dan wartawan dipecat dan pembredelan koran-koran dan majalah-majalah pada September 1981. Tindakan refresif Sadat ini harus dibayar dengan pembunuhan atas dirinya pada acara parade senjata Oktober 1981.

Di bawah pemerintahan Husni Mubarak, IM tetap berada dalam situasi sulit. Ikhwan tetap menyandang predikat organisasi terlarang. Namun demikian, dengan berbagai cara hakekat IM sebagai gerakan Islam tetap bertahan hingga kini. Lalu belajar dari strategi lama yang selalu mengalami kegagalan, *mursyid 'am* IM memakai suatu strategi yang bisa menjauhkan diri mereka dari bentrokan dengan pemerintah. Ia sering mengulang-ulang perkataan, bahwa pergerakan dakwah Ikhwan harus berjalan dengan hikmah dan menghindari kekerasan dan radikalisme. Muhammad Hamid Abu Naser kemudian terpilih menjadi *mursyid 'am* setelah

Umar Talmasani. Demikian juga Mustafa Masyhur yang terpilih menjadi *mursyid 'am* organisasi IM.¹⁸

Selain di Mesir, IM juga berkembang di luar seperti Syria, Irak, Palestina, Yordania, Yaman, Sudan dan lain-lain. Di Irak, Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Syekh Muhammad Mahmud As-Sawwaf. Ia kemudian terpilih sebagai pemimpin umum gerakan IM di negeri itu. Dia juga memiliki banyak karya tulis dan memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan Islam di benua Afrika. Setelah berpindah dari Irak 1959 M, dia menetap di Mekkah Al-Mukarramah. Sedangkan di Syria, IM didirikan oleh Dr. Mustafa As-Siba'i (1334-1384 H/ 1915-1964 M). Dia adalah Pimpinan Umum IM yang pertama di Syria. Ia berhasil meraih gelar doktor dari Fakultas Islamic Law, Universitas Al-Azhar Mesir tahun 1948 M. dan memimpin pasukan IM pada Perang Palestina pada 1948, kemudian mencalonkan diri ke Majelis Syura sebagai wakil rakyat dari kota Damaskus. Dia adalah seorang orator kritis yang terkenal. Dia juga dikenal sebagai pendiri Fakultas Syariah di Damaskus tahun 1954 M dan menjadi dekan pertama fakultas ini. Ia memiliki banyak karya tulis, seperti Sunah dan Kedudukannya di dalam Hukum Islam (*As-Sunnah Wamakanatuha fi At-tasyri'*), Perempuan antara Fiqih dan Hukum (*Al-Mar'ah baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*), dan Hukum Ahwal Syakhsyah (*Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsyah*). Sedangkan di Jordania, IM diprakarsai oleh Syekh Abdul Latif Abu Qurah. Pada tanggal 13 Ramadhan 1364 H/ 19 November 1945 M, terbentuk IM di Jordania. Dia menjadi Pimpinan Umum IM yang pertama di Jordania, dia juga yang memimpin IM Jordania dalam perang Palestina 1948. Kemudian ia digantikan oleh Muhammad Abdur Rahman

¹⁸Hassan Hanafi, *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, terjm. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayanti (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 172.

Khalifah.¹⁹

D. Pemikiran Ikhwanul Muslimin dan “Radikalisme Islam”

Pemikiran IM sesungguhnya sangat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Namun di tengah dinamika tersebut terdapat hal yang tak berubah hingga kini. IM mengambil pemikiran aliran kaum salafiah yang menekankan pentingnya kembali kepada dua sumber utama, yaitu Alqur’an dan Sunah, serta menjaga diri dari setiap apa pun bentuk kemusyrikan demi mencapai kesempurnaan tauhid. Kehidupan umat Islam harus diupayakan zaman ideal yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya (*salaf al-salih*). Aliran pemikiran dakwah pergerakan mereka terpengaruh oleh gerakan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahhab, gerakan dakwah Sanusiah, dan gerakan dakwah Sayid Rasyid Ridha. Tetapi dalam banyak hal, gerakan ini merupakan kelanjutan dari aliran Ibnu Taimiyah yang wafat pada 728 H/ 1328 M, yang berafiliasi ke mazhab Ahmad bin Hanbal.²⁰

Sebagai organisasi, pemikiran IM terbentuk dari interaksi, dialog dan pergumulan pemikiran tokoh-tokohnya. Tetapi, Pemikiran IM sangat terpengaruh oleh dua tokoh besarnya; Hasan Al-Banna sebagai pendiri IM dan Sayyid Qutb sebagai ideolog IM. Al-Banna sebagai motor penggerak organisasi lebih banyak meletakkan dasar-dasar *manhaj* dakwah IM. Dokumen-dokumen resmi, seperti AD-ART IM pada masa-masa awal adalah buah tangan Al-Banna. Ia juga menulis risalah tentang pergerakan yang juga menjadi acuan para aktifis IM. Sementara Qutb memberikan konsep yang relatif lengkap

¹⁹*Ibid.*, h. 16-18

²⁰Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 35

dan utuh dari filosofi, ideologi hingga metode perjuangan. Qutb bisa dibidang menyempurnakan bangunan dasar yang telah diletakkan Al-Banna, meskipun banyak pemikiran Al-Banna yang ditarik ke kutub ekstrim oleh Qutb, sehingga banyak metode gerakannya yang berseberangan dengan Al-Banna.²¹

Secara umum, pemikiran IM dibangun berdasarkan premis awal bahwa Islam merupakan agama *syumul*, yang meliputi segala segi kehidupan. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya berkenaan dengan ibadah ritual dan urusan-urusan privat semata. Tetapi ia juga menyangkut kehidupan publik umat Islam. Dalam sebuah makalah yang dimuat koran Ikhwan, Al-Banna mengatakan, bahwa tidaklah sempurna keislaman seorang muslim yang mengabaikan kondisi umat yang rusak dengan menyibukan diri dengan ibadah.²² Dalam risalah lain Al-Banna mengatakan, bahwa syarat kesempurnaan Islam seseorang adalah keterlibatannya dalam aktivitas politik.

Dengan demikian Alqur'an dan Sunah harus dijadikan landasan bagi setiap aktivitas hidup, baik sosial, ekonomi, budaya dan politik. Maka Islam mesti mewarnai seluruh bangunan sistem hidup umat Islam. Oleh karena itu, bagi IM, dakwah Islam harus menjangkau seluruh aspek kehidupan dan tidak boleh meninggalkan satu aspek pun. Segala sistem yang tidak Islami akan menjadi target dakwah IM. Maka segala upaya untuk menjauhkan atau memisahkan Islam dari salah satu aspek kehidupan umat, akan ditentang oleh IM. Oleh karena itu, gagasan sekularisasi menjadi salah satu musuh utama IM.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka bagi IM Islam adalah agama dan negara (*din wa dawlah*) sekaligus. Islam memiliki konsep

²¹*Ibid.*, h. 36-37

²²*Ibid.*, h. 18-20

sosial dan politik tersendiri yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Oleh karena itu, selain masyarakat, negara juga harus diislamkan. Untuk itu, segala pemikiran, ideologi, nilai-nilai dan tindakan kolektif harus bersumber dari Islam. Demikian juga dengan sistem kenegaraan, harus menempatkan Islam sebagai sumber satu-satunya. Syariat Islam harus mengatur perilaku politik, sistem dan aturan perundang-undangan. Dengan demikian, syiar Islam akan menjadi luas dan negara akan menjadi kuat serta mampu menjamin kehidupan ideal bagi warga negara.

Sebagai perwujudan dari pemikiran di atas, Al-Banna menetapkan, bahwa prioritas jenjang tugas yang diharapkan dari anggota Ikhwan adalah, *pertama*, memperbaiki diri pribadi (*ishlah an-nafs*), ini merupakan upaya islamisasi pribadi sebagai unsur terkecil dari masyarakat. *Kedua*, membentuk rumah tangga Islami (*ishlah al-bait al-muslim*), sebab pembangunan masyarakat yang Islami mesti dimulai dari keluarga. *Ketiga*, perbaikan masyarakat (*ishlah al-mujtama'*), agar tercipta situasi kondusif bagi berkembangnya kehidupan yang Islami. *Keempat*, membebaskan bangsa (*tahrir al-watan*), yaitu pembebasan bangsa dari segala bentuk penjajahan kekuasaan asing non-Islam dalam segala aspeknya. *Kelima*, memperbaiki pemerintahan (*ishlah al-hukumah*), yaitu dengan melakukan perubahan ke arah yang Islami. *Keenam*, mengembalikan kejayaan umat islam di kancah internasional dengan cara membebaskan negara-negara muslim dan membangun kehidupan mereka. *Ketujuh*, melakukan dakwah ke seluruh dunia dalam rangka memberantas kesesatan.

Untuk mewujudkan tujuh agenda di atas, IM menetapkan strategi yang tergolong moderat. Metode pergerakan Al-Banna selalu berdasarkan pada metode *tadarruj* dengan program-program

bertahap. Ada tiga tahap yang ditetapkan IM, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Banna, fase gerakan organisasi dibagi menjadi tiga, yaitu fase pengenalan (*marhalah al-ta'rif*), fase pembinaan (*marhalah al-takwin*), dan fase pelaksanaan (*marhalah al-tadwin*).²³

Al-Banna tidak pernah memakai cara-cara kekerasan di dalam menyebarkan dakwahnya. Ia tidak suka dengan cara-cara, seperti kudeta militer, revolusi rakyat, atau menegakkan masyarakat Islam dengan kekuatan besi, api dan mesiu, karena hal itu hanya akan mendatangkan kekacauan dan menyebabkan munculnya bahaya yang lebih besar.²⁴ Selain itu Al-Banna menganut prinsip keterbukaan dan inklusifitas. Ia tidak menjadikan IM sebagai organisasi yang tertutup, yang hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, tetapi membuka diri kepada siapa saja. IM juga terbuka untuk bekerjasama dengan pihak manapun sebagaimana ungkapannya: "kita saling membantu dan bekerja sama dalam masalah-masalah yang kita sepakati, namun kita saling berlapang dada dalam masalah-masalah yang tidak sepaham". Kecenderungan ini juga ditunjukkan Al-Banna terhadap organisasi Islam lain, termasuk terhadap pemerintah.²⁵ Meskipun demikian ada juga pengamat yang meragukan hal itu, salah satunya adalah Dr. Rif'at Said. Ia berkesimpulan bahwa Al-Banna menolak bahkan memusuhi kekuatan politik di luar IM. Bahkan Al-Banna dikatakannya menganggap kafir umat Islam yang tidak terlibat dalam aktivitas politik IM.²⁶

Setelah mengalami tekanan politik tahun 1949, 1954-1955 dan 1965, terjadi perkembangan yang signifikan dalam pemikiran dan

²³Fathi Yakan, "Revolusi" Hasan Al-Banna, h. 22.

²⁴*Ibid.*, h. 138.

²⁵*Ibid.*, h. 129-136.

²⁶*Ibid.*

gerakan Ikhwan. Dalam diri IM mulai berkembang dua kecenderungan, yaitu aliran moderat yang banyak mengacu ke pendiri pertama Hasan Al-Banna dan aliran radikal yang merujuk kepada pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Al-Banna selalu bersikap tegas bahwa ia tidak memiliki niat untuk melakukan kudeta atau mengambil alih kekuasaan. Tujuan utama IM adalah pendidikan. Dia percaya bahwa jika masyarakat telah menyerap risalah Islam dan membiarkannya mengubah mereka, maka Mesir akan menjadi Negara Islami, tanpa perlu adanya pengambil alihan secara paksa.²⁷ Namun perlu digaris bawahi, bahwa substansi pemikiran dan agenda akhir dua kelompok ini tetap sama, yakni mewujudkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Aliran pertama menganut strategi gradualis, dengan menunda setiap konfrontasi dengan negara, hingga keanggotaan dan kekuatan kelompok itu benar-benar menjamin kekuatannya. Hal ini sering disebut dengan strategi *taqiyyah* (penyamaran). Kelompok kedua lebih percaya kepada tindakan radikal seketika terhadap pemerintah yang ada. Mereka lebih senang beraksi secara langsung dan unsur-unsur militannya menjadi lebih menonjol.²⁸ Berangkat dari penilaian terhadap kelompok kedua inilah kemudian dikait-kaitkan dengan sosok Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin dalam hal pembentukan “radikalisme Islam”.

Senada dengan hal di atas, Fathi Yakan mengungkapkan, bahwa dalam tubuh IM terdapat perpecahan berbagai aliran pemikiran dan gerakan yang disebabkan tidak adanya kesinambungan, upaya mengasimilasi, mengkristalkan diri dengan

²⁷Karen Amstrong, *Berperang Demi Tuhan*, terj. Satrio Wahono dkk., (Jakarta: Serambi, 2001), h. 349-350.

²⁸Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam*, h. 16 & 18.

pemikiran dan prinsip-prinsip Al-Banna sebagai pendiri IM, dan tidak adanya keterbukaan untuk mengakomodasi aspek positif dari orang lain. Yakan menyebutkan, ada beberapa aliran: Aliran Sayyid Qutb (*al-madrasah al-qutbiyyah*), aliran Hasan Al-Turabi (*al-madrasah al-turabiyyah*), aliran Pengkafiran dan Hijrah (*al-madrasah al-takfir wa al-hijrah*), aliran Front Pembebasan Islam (*al-madrasah al-jabhah al-islamiyyah*), aliran Jama'ah Islamiyah Bersenjata (*al-jama'ah al-islamiyyah al-musallahah*), dan aliran-aliran lain yang lahir dari keluarga besar IM.²⁹

Aliran-aliran tersebut dianggap cenderung bersifat radikal, yang suka memakai cara-cara kekerasan dan konfrontasi. Hal ini dinilai Yakan sebagai inkonsistensi dari garis-garis besar pemikiran dan prinsip-prinsip IM pada masa awal, sebagaimana dicanangkan oleh Al-Banna.³⁰

E. Pemikiran Politik Al-Banna

Ikhwanul Muslimin (IM) memproklamirkan diri sebagai gerakan politik pada tahun 1939, yaitu pada Muktamar ke-5 IM, bertepatan dengan peringatan 10 tahun kelahirannya. Ada dua alasan pokok yang berkaitan politik yang merupakan tujuan umumnya, yaitu; pertama membebaskan negara Islam dari penguasa asing. Kedua, mendirikan negara Islam yang bebas melaksanakan hukum Islam, menerapkan sistem sosial masyarakat dan menyampaikan prinsip dan dakwahnya kepada seluruh manusia.³¹

²⁹Adib Dimitri, "*As-Simat al-Asasiyah li al-Harakah al-Islamiyah fi Misr*" dalam *Al-Ushuliyyat al-Islamiyyah fi 'Asrina al-Rahin*, (Kairo: Qadayah Fikriyyah, 1993), h. 184-189.

³⁰*Ibid.*

³¹Syaikh Mushthafa Mansyhur, *Fiqh Dakwah Jilid 1*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2000), h. 222.

Berikut ini dikemukakan di antara pemikiran politik Hasan Al-Banna:

1. Agama dan Politik

Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu *siyasah*, yaitu ilmu tata negara. Pengertian dan konsep politik atau siyasah dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Ia merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.³² Sejak IM didirikan oleh Al-Banna kondisi Mesir dan dunia Arab berada dalam lingkungan pemikiran Barat. Para tokoh sekuler hanya membatasi aktivitas agama sebatas dinding masjid dan menjadi urusan pribadi.³³ Padahal pada dasarnya Islam adalah sistem yang sempurna.

Pandangan Al-Banna terhadap konsepsi politik adalah, ketika berbicara mengenai hubungan antara Islam dan politik dan sikap seorang mukmin terhadapnya. Mengutip pernyataan Al-Banna mengenai pendapatnya tentang politik, "Tidak seorang pun berbicara kepada anda tentang politik dan Islam kecuali anda dapati bahwa ada pemisahan antara keduanya sejauh-jauhnya, mereka memberi pemahaman kepada kaum muslimin bahwa Islam adalah sesuatu, sedangkan masyarakat adalah sesuatu yang lain, Islam adalah sesuatu sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang lain, dan Islam harus berada jauh dari politik".³⁴ Katakanlah kepadaku, wahai

³²Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4-6.

³³Musthafa Muhammad Thahan, *Pemikiran Moderat Hasan Al-Banna*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007), h. 11.

³⁴Yuss Rahman, *Gerakan Islam Demokrasi dan Politik*, diakses dari <http://yusranrahman.multiply.com>.

saudaraku semua, jika Islam adalah sesuatu yang bukan politik, bukan sosial, bukan ekonomi, bukan pula budaya, lalu apa? apakah ia adalah beberapa bilangan rakaat yang sepi dari kehadiran hati ini? ataukah ia adalah beberapa ungkapan seperti yang pernah dikatakan oleh Rabi'ah Al- 'Adawiyah, istighfar yang membutuhkan istighfar? Hanya untuk inilah, wahai saudaraku?, Alquran diturunkan sebagai sistem yang pasti, terperinci dan sempurna?³⁵

Kesuksesan dakwah Rasulullah pun merupakan suatu implementasi dari strategi politik yang beliau rancang, bisa kita lihat mulai dari hijrah ke Madinah hingga puncaknya adalah Fathu Makkah (penguasaan Mekah). Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat bukannya mencoba lari dari intimidasi rezim kafir Quraisy, namun justru sebaliknya Rasulullah dan para sahabat melakukan konsolidasi politik yakni mulai dari membangun kekuatan politik internal hingga mengadakan koalisi politik dengan kaum Yahudi dan Nasrani melalui nota perjanjian Piagam Madinah. Beliau berpendapat bahwa, "Politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat".³⁶ Yang dimaksud dengan politik sisi internal adalah mengatur roda pemerintahan, menjalankan tugas-tugasnya, merinci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik serta diluruskan jika kemudian mereka menyimpang".³⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan sisi eksternal politik adalah "menjaga kebebasan dan kemerdekaan bangsa, menanamkan rasa kepercayaan diri, kewibawaan, dan meniti jalan menuju sasaran -

³⁵Hasan Al-Banna, *Risalah Ikhwanul Muslimin* Jilid I, h. 66.

³⁶Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 72.

³⁷Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1*, h. 68

sasaran yang mulia, yang dengan cara itu bangsa akan memelihara harga diri dan kedudukan tinggi dikalangan bangsa-bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya dengan menetapkan pola interaksi bilateral maupun multilateral yang menjamin hak-haknya serta mengarahkan semua negara menuju perdamaian internasional yang peraturannya ini bisa mereka sebut Hukum Internasional.”³⁸

Al-Banna mengaitkan aqidah dengan aktivitas politik, “Ia berkata sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politikus, yang mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian yang penuh terhadap persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntunnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya”.³⁹ Selanjutnya Al-Banna mengatakan “Sesungguhnya kami adalah politikus dalam arti kami memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa kami, dan kami bekerja dalam rangka mewujudkan kebebasan seutuhnya”.

Karenanya, menurut Ikhwan, politik adalah upaya memikirkan persoalan internal dan eksternal umat, memberikan perhatian kepadanya, dan bekerja demi kebaikan seluruhnya. Ia berkaitan dengan aqidah dan akhlak serta bertujuan untuk melakukan perubahan. Definisi ini sesuai dengan kondisi Mesir, khususnya pada masa-masa pendudukan asing. Karena memberikan motivasi internal kepada individu untuk melakukan aktivitas politik dalam permikiran, perhatian dan usaha dalam mengubah kondisi umat serta menjadikan politik sebagai masalah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Gagasan Al-Banna tentang Islam dan politik

³⁸*Ibid.*, h. 72-73.

³⁹Usman Abdul Mu’iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, h. 72-73.

berbeda dari tokoh politik sebelumnya, Al-Banna membuat terobosan baru, yaitu dengan menjadikan isu ekonomi dan isu sosial sebagai bagian dari program pergerakan IM. Isu itu menjadi bagian dari pembicaraan publik Mesir terutama ketika pengaruh sosialisme semakin besar. Secara gamblang konsep pokok yang dipahami Al-Banna tentang lingkup dari ajaran Islam dapat dilihat dalam *risalah ta'lim*, risalah yang ditujukan khusus kepada mujahidin IM sebagai suatu perintah yang harus diamalkan, pada rukun *bai'at* kesatu tentang *al-Fahmu* (pemahaman) yang memuat tentang *Ushul 'Isyirin* (dua puluh pokok pemahaman Islam) yang wajib dipahami oleh anggota *ikhwan*, pasal 1 yang berbunyi:

“Islam adalah sistem yang *syamil* (menyeluruh), mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka ia adalah negara dan tanah air atau pemerintahan dan ummat, moral dan kekuatan, atau kasih sayang dan keadilan, wawasan dan undang-undang, atau ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam atau penghasilan dan kekayaan, serta jihad dan dakwah atau pasukan dan pemikiran. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang murni dan benar, tidak kurang tidak lebih”⁴⁰

Bila dilihat dari pengertian ini, maka menjadi jelas bahwa ruang lingkup dari Islam itu sendiri tidak memungkinkan untuk tidak menyentuh lingkup politik dan negara. Hal ini juga terkait dengan aturan dalam Islam itu sendiri yang mengatur urusan-urusan yang memerlukan kekuasaan sebagai pelaksanaannya. Jadi agama dan politik mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan.

⁴⁰Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid II*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2005) h. 162-163.

2. Konsep Pemerintahan

Al-Banna menyesuaikan isi negara Islam dengan sistem politik yang ada di Mesir, ia menghindari konfrontasi dengan negara dan cenderung menyatakan pandangan secara umum, serta enggan menyebutkan visi negara Islam. Dia tidak menyerukan untuk mengganti tatanan politik yang sedang berlaku di Mesir, bahkan ia berusaha memperbaikinya. Seruan negara Islam Al-Banna agaknya bertentangan dengan nasionalis Mesir yang sedang dominan waktu itu, maka beliau mendiskusikan konsep patriotisme dan membentuk nasionalisme IM. Dia menyatakan bahwa dirinya siap memperkuat Mesir sebagai negara Islam, dan mengungkapkan bahwa patriotisme bangsa Mesir merupakan perwujudan cinta tanah air kaum muslimin, beliau setuju dengan nasionalisme, apabila berupaya membuat warga negara sadar dengan sejarahnya dan solidaritas muslim. Dia mengatakan "Adalah kesalahan besar bagi mereka yang menyatakan bahwa IM apatais terhadap masalah tanah air dan nasionalisme. Kaum muslimin adalah orang-orang yang paling ikhlas berkorban bagi tanah air mereka dan menghormati siapa saja yang mau berjuang dengan ikhlas dalam membelanya".⁴¹ Adapun mengenai negara (pemerintahan), dalam *Nizhamul Hukkam* Al-Banna menyatakan:

"Islam yang *hanif* ini mengharuskan pemeintahannya menjadi salah satu penegak dari beberapa penegak sistem sosial yang hadir untuk umat manusia. Islam tidak mentolerir kekacauan, dan tidak membiarkan umat Islam hidup tanpa pemimpin. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya "Jika engkau berada di suatu negeri yang

⁴¹Abdul Hamid Al-Ghazali *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2001), h. 157.

tidak ada kepemimpinan di dalamnya, maka tinggalkan negeri itu". Dalam hadits lain Rasul bersabda "Jika kalian bertiga, angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin".⁴²

Adapun teori tentang bentuk suatu entitas yang dapat dinamakan negara, maka hal tersebut sangatlah *liquid* dalam artian teori tentang hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, yang dalam abad ini kita memandang konsep negara sebagai suatu *nation state* (negara bangsa), namun fungsi negara yang pokok sebagaimana telah dijelaskan diatas tetaplah melekat pada entitas yang bernama negara.

Dari pengertian-pengertian di atas dengan jelas dapat kita pahami bahwasannya Islam dalam pemahaman Al-Banna sangatlah terkait dengan fungsi negara atau pemerintahan sebagai suatu entitas yang memiliki kekuatan dan wewenang, yang diberikan oleh masyarakat (umat), untuk mengatur urusan-urusan yang berlaku di antara manusia, termasuk menegakkan syariat dalam salah satu risalahnya ia mengutip perkataan dari Utsman bin Affan ra. "Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dicegah dengan Alqur'an". Oleh karena itu, sikap pemikiran Ikhwan terhadap pemerintahan berkaitan erat dengan pemahaman mereka terhadap esensi Islam dan aqidahnya Islam sebagaimana yang dipahami oleh IM menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilarnya. Islam adalah kedaulatan dan pemerintahan ia juga peraturan, dan pengajaran, sebagaimana ia adalah undang-undang dan peradilan. Salah satu diantaranya tidak

⁴²Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1*, h. 297-298.

terpisakan dari yang lain.⁴³

IM, sebagai gerakan Islam kontemporer dari Mesir turut berupaya menawarkan konsepsi terkait dengan negara (Islam). Konsepsi yang direpresentasikan oleh pendirinya Al-Banna dirumuskan dari Alqur'an dan Sunnah dan pemerintahan harus tegak di atas kaidah sistim sosial yang telah digariskan Allah.⁴⁴ IM melihat bahwa negara juga bagian dari aqidah Islam itu sendiri. Sebagaimana manifestasi karakter Islam yang membawa *rahmatan lil alamin*, negara diharapkan juga memberikan jaminan keamanan, kesejahteraan dan hak-hak hidup yang lainnya bagi rakyatnya. Al-Banna mengatakan *Daulah Islamiyah* tidak akan tegak kecuali bertumpuh pada pondasi dakwah,⁴⁵ bahwa Alqur'an merupakan kitab suci yang mencakup semua prinsip reformasi sosial yang komprehensif sehingga Alqur'an menjadi dasar bagi rekonstruksi *daulah Islamiyah*.

Selain prinsip-prinsip rekonstruksi *daulah Islamiyah* juga terdapat kewajiban-kewajiban syiar yang mendukung rekontruksi ini. Secara ringkas, prinsip-prinsip rekonstruksi *daulah Islamiyah* itu adalah sebagai berikut. (1) Kekuatan motivasi internal (*aqidah Islamiyah*). (2) Persiapan mental (meningkatkan kualitas jiwa dan mengendalikan naluri manusia). (3) Memerangi rasialisme (ukhuwah, solidaritas dan emansipasi pria, dan wanita). (4) Persiapan individu (moral, keilmuan, dan ketrampilan). (5) Melindungi hak-hak asasi manusia (moral maupun material). (6) Memelihara stabilitas dalam negeri (mengikis habis sparatisme dan bertindak tegas terhadap tindak kejahatan yang berat). (7) Menjaga kedaulatan dan batas-batas

⁴³Usman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, h. 286.

⁴⁴Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1*, h. 297.

⁴⁵*Ibid.* Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1*, h. 298.

negara (kewajiban jihad). (8) Tanggung jawab peradaban (menyebarkan prinsip-prinsip kebenaran yang diusung oleh Islam. Sementara itu, syiar-syiar terapan yang menopang proses rekonstruksi ini merupakan kewajiban-kewajiban pada level individu dan masyarakat muslim. Berbicara masalah negara, tidak bisa lepas dari tema politik, sehingga Hasan Al-Banna mengungkapkan bahwa seorang muslim adalah politikus yang bertolak dari keislamannya, politikus yang berpandangan jauh kedepan dan antusias terhadap problematika umat.⁴⁶ Titik tolak kebangkitan berasal dari pengendalian pemikiran politik yakni berangkat dari integralitas Islam yang mewajibkan adanya perjuangan politik. *Daulah* (negara) adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan atau kekuasaan, sedangkan kekuasaan adalah kekuatan yang *legitimate* atau lembaga politik yang memiliki wewenang secara mutlak untuk menata kehidupan umum disebuah wilayah melalui departemen-departemen yang telah ditetapkan.

Negara harus mencerminkan *fikrah* Islam sebagai sistem hidup yang paripurna yakni “Daulah yang mencerminkan fikrah, tegak untuk melindunginya, bertanggung jawab untuk merealisasikan target-targetnya di tengah masyarakat Islam dan menyebarkannya ke seluruh umat manusia. *Daulah Islamiah* yang berdaulat, yang menjalankan hukum-hukum Islam, menerapkan sistem sosial, memproklamkan prinsip-prinsipnya yang luhur dan menyebarkan dakwahnya yang bijak kepada umat manusia”(*Risalah Bainal Amsi Wa Yaum*).⁴⁷

Ikhwan memandang pemerintahan adalah bagian dari Islam itu sendiri dan sebagai sarana penerapan Islam dan penyebarannya,

⁴⁶Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid I*, h. 100.

⁴⁷*Ibid.*, h. 207.

sebagaimana dinyatakan Al-Banna dalam risalah muktamar ke-5. Ikhwan memandang nasionalisme juga merupakan *aqidah Islamiah* itu sendiri. Nasionalisme inilah yang membedakan dengan bentuk-bentuk nasionalisme yang lainnya seperti nasionalisme kerinduan, nasionalisme kebebasan dan kehormatan dan nasionalisme kemasyarakatan.⁴⁸ Selain nasionalisme, Al-Banna juga menawarkan konsep kebangsaan yang berbeda dengan konsep kebangsaan jahiliah.

Al-Banna menjelaskan dasar-dasar kebangsaan yang berpijak pada loyalitas total kepada Allah, Rasul dan orang-orang Mukmin. IM memandang eksistensi negara haruslah berdiri pada landasan sistem sosial yang berlandaskan Islam untuk umat manusia, sebuah negara yang tidak hanya akan mendatangkan kebahagiaan untuk umat Islam saja akan tetapi juga untuk seluruh umat manusia., IM tidak terlalu memperdulikan bentuk dan nama negara selama negara itu mampu merealisasikan kaidah-kaidah asasi yang menjadi pilar tegaknya pemerintahan yang bijak dan selama berkomitmen untuk menerapkannya sehingga bisa menjaga keseimbangan kaidah-kaidah asasinya.⁴⁹

Secara ringkas Al-Banna mengungkapkan beberapa karakteristik dan kewajiban serta hak-hak negara.⁵⁰ Adapun Karakteristik negara terdiri dari: (1) kesadaran akan tanggung jawab; (2) kasih sayang terhadap rakyat; (3) bertindak adil kepada umat manusia; (4) bersikap *'iffah* (menjaga diri) dari harta milik umum; dan (5) ekonomis dalam pemanfaatannya. Sementara itu, kewajiban-kewajiban negara terdiri dari: (1) menjaga keamanan; (2) melaksanakan undang-undang; (3) menyebarkan pendidikan; (4)

⁴⁸Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1*, h. 37-39.

⁴⁹Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 1999) h. 183 -184.

⁵⁰*Ibid.*, h. 83.

menyiapkan kekuatan; (5) memelihara kesehatan; (6) memelihara kepentingan umum; (7) mengembangkan sumber daya alam dan menjaga harta kekayaan; dan (8) mengokohkan akhlak dan menyebarkan dakwah. Adapun hak-hak negara yaitu:⁵¹ (1) loyalitas dan ketaatan; dan (2) dukungan dengan jiwa dan harta terkait sistem pemerintahan.

Selain itu, Al-Banna memandang bahwa perlu adanya pemisahan antara tiga fungsi (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) dalam suatu negara karena penggabungan dan pengkonsentrasian tiga fungsi di atas akan mengarah pada otoritarianisme dan diktatoritas. Selain itu, diperlukan adanya perbaikan manajerial pada lembaga-lembaga negara (yang harus disesuaikan dengan ajaran Islam).⁵²

3. *Tanggung Jawab Pemerintah*

Al-Banna memandang agama Islam yang diyakini oleh IM telah menjadikan pemerintahan sebagai salah satu rukunnya, ia tidak hanya sebagai sarana penasehat, akan tetapi juga sarana untuk menerapkan ajaran islam.⁵³ Yang dimaksud dengan tanggung jawab pemerintah adalah bahwa dalam menjalankan tugasnya pemerintah bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. Ia adalah pelayan dan pekerja bagi rakyat yang menjadi tuannya. Rasulullah SAW bersabda: *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya”*.⁵⁴

Al Banna mengutip pernyataan Abu Bakar ra. *“Wahai sekalian manusia, aku dulu bekerja untuk keluargaku. Akulah yang menghasilkan*

⁵¹*Ibid.*, h. 183-184.

⁵²Usman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, h. 304.

⁵³Abdul Hamid Al-Ghazali, *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat*, h. 169.

⁵⁴Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1*, h. 299.

makan buat mereka. Namun, kini aku bekerja untuk kalian, maka bayarlah aku dari Baitul Maal kalian".⁵⁵ Selanjutnya, ia menerangkan bahwasannya ungkapan tersebut memberikan penafsiran paling baik dan paling adil terhadap teori kontrak sosial antara pemerintah dan rakyatnya. Bahkan, Abu Bakar ra. telah meletakkan dasar-dasarnya bahwa kontrak antara rakyat dengan pemerintah adalah sama-sama terikat untuk memelihara kepentingan bersama. Jika ditunaikan dengan sebaik mungkin ia berhak mendapat pahala dan balasan jasa dari rakyat, sebaliknya, jika tidak, sanksi hukuman telah siap menanti.⁵⁶

Dalam konsep Islam yang murni, penyerahan kekuasaan melalui perjanjian (yaitu dengan bai'at) justru telah terjadi dengan nyata/konkrit. Kepemimpinan negara dalam Islam apa pun nama yang disandangkan kepada pemimpin dan terdapat kaidah-kaidah langsung dari syariat yang mengatur bagaimana ketaatan yang seharusnya dilakukan. Hal inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Alqur'anul Azhim ketika menafsirkan ayat 59 Surat An-Nisaa tentang keharusan mentaati Allah, mentaati rasul-Nya dan *Uuil Amri*.

Dalam tafsir tersebut Ibnu Katsir menjelaskan *asbabun nuzul* dari ayat ini terkait dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin Adi tatkala ia diutus oleh Rasulullah SAW dalam suatu pasukan. Dimana pemimpin pasukan tersebut memerintahkan pasukannya untuk mentaati perintahnya untuk masuk ke dalam api yang dibakar di atas kayu bakar. Kemudian pemuda yang berada di pasukan tersebut enggan mentaatinya kecuali setelah menanyakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan "Apabila kalian

⁵⁵*Ibid.*, h. 299.

⁵⁶*Ibid.*, h. 299.

memasukinya niscaya kalian tidak pernah keluar lagi untuk selama-lamanya, sesungguhnya ketaatan itu hanya mencakup *kema'rufan*", hadits tersebut terdapat dalam *shahihain*.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa terjadinya penyerahan kekuasaan melalui perjanjian (bai'at) dari rakyat kepada penguasa/pemerintah, tidaklah membenarkan kesewenangannya, justru ia terikat oleh tanggung jawab, terhadap pihak yang memberikan bai'at untuk melayani mereka, dan bagi yang telah memberikan urusan dirinya (yang berbai'at) maka ia hanya terikat ketaatan selama hal tersebut tidak melanggar hal-hal yang ma'ruf. Apabila diperintahkan untuk melakukan kerusakan maka boleh untuk tidak taat dan berlepas diri dari hal tersebut. Inilah yang dimaksud oleh Hasan Al-Banna sebagai penafsiran yang paling baik terhadap teori kontrak sosial.

4. Kesatuan Umat

Kemudian yang dimaksud Al-Banna dengan kesatuan umat adalah, bahwa pemerintah dalam bertindak dan mengambil kebijakan haruslah menjaga kesatuan umat. Bukan justru diartikan sebagai semuanya harus mengikuti apapun kata penguasa. Karena dalam Islam justru terdapat praktek memberi nasihat *amar ma'ruf nahi munkar*. Al-Banna mengutip hadits Rasulullah:⁵⁷

1. Rasulullah bersabda "Agama itu nasihat" mereka bertanya bagi siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan kalangan umum mereka"

⁵⁷Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1*, h. 299-300.

2. Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang yang berdiri di hadapan pemimpin durjana dengan memerintahnya (berbuat ma'ruf) dan melarangnya (dari perbuatan munkar), kemudian ia dibunuh".

Dalam penjelasan mengenai kesatuan ummat ini Al-Banna juga menjelaskan mengenai perbedaan, bahwasannya tidak ada perbedaan prinsip / hal yang pokok dalam Islam, tetapi dalam hal-hal yang sifatnya cabang (*furu'*) perbedaan itu diperbolehkan dengan tetap menjaga bingkai persatuan. Al-Banna mengatakan "yang ada adalah keharusan riset, kajian, musyawarah, dan saling menasihati. Jika termasuk pada hal yang telah dinashkan maka pintu ijtihad tertutup. Sedangkan bila tidak dinashkan, maka keputusan pemerintah harus menyatukan umat. Namun ketentuan kedua terlaksana setelah ketentuan pertama."⁵⁸

Di dalam Islam persatuan menjelma dalam sebuah persaudaraan yang menyatu diatas landasan aqidah yang sama seperti yang telah ditegaskan dalam *Kitabullah*.⁵⁹ Dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan kesatuan umat oleh Al-Banna adalah menginginkan kebijaksanaan pemerintah dalam mengayomi masyarakat harus mengedepankan persatuan umat dan selalu berusaha menjauhi perpecahan. Perbedaan adalah sunatullah, selama perbedaan itu hanya *furu* (Cabang), tidak ada masalah dan hal yang tidak bisa dimusyawarahkan dengan baik. Jika ada kepincangan dari kebijaksanaan dari pemerintah, maka sebagai warga negara yang baik memiliki kewajiban saling menasehati guna sama-sama menjaga bingkai persatuan.

⁵⁸*Ibid*, h. 300.

⁵⁹Abas Asiisi, *Bersama Kafilah Ikhwan Jilid 1*, (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2005), h. 339.

5. Sikap menghargai aspirasi rakyat

Mengenai menghargai aspirasi rakyat, Al-Banna menjelaskan “Di antara hak umat Islam adalah mengawasi roda pemerintahan sedetail mungkin dan aktif bermusyawarah berkenaan sesuatu yang dipandang baik. Sementara itu, kewajiban pemerintah adalah bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dan mengambil masukan-masukan yang baik”.⁶⁰ Allah SWT telah memerintahkan kepada pemerintah agar melakukan hal itu “*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*” (Ali Imran : 159). Bahkan, Allah memuji kaum muslimin yang mau bermusyawarah sebagai muslimin yang baik “*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka*” (Asy-Syura: 38).

Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunah Rasulullah SAW dan Khaulafur Rasyidin. Ketika muncul suatu masalah, mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin, bermusyawarah, dan mengambil pendapat yang benar dari mereka. Lebih dari itu, para khalifah mengajak dan menganjurkan kaum muslimin untuk (berpegang) pada pendapat yang benar . Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, “Jika kalian melihat aku di atas kebenaran, maka dukunglah (untuk melaksanakannya), dan jika kalian melihatku dalam kebatilan, maka betulkan dan luruskanlah.” Umar bin Khatthab berkata “ Siapa saja yang melihatku menyimpang, maka luruskanlah.”⁶¹ Dalam bagian awal risalah *Nizhamul Hukum* (Pemerintahan), Al-Banna telah menegaskan: “*Daulah Islamiyah* tidak akan tegak kecuali berdiri di atas pondasi dakwah, sehingga ia menjadi negara risalah bukan hanya sekedar bagan struktur dan bukan pula pemerintahan yang materialistis, yang jumud, pasif,

⁶⁰Hasan Al-Banna , *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1*, h. 301.

⁶¹*Ibid*, h. 301

tanpa ruh di dalamnya. Demikian pula dakwah tidak mungkin tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang akan menjaga, dan mengokohkannya.

6. Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam pandangannya yang tersebar di beberapa risalah yang ditulisnya Al-Banna memberikan kompromi terhadap berbagai sistem pemerintahan modern asalkan sistem tersebut bersesuaian dengan kaidah-kaidah Islam. Terhadap sistem pemerintahan parlementer ini (yang ketika itu diterapkan di Mesir), dalam risalah *Nizhamul Hukum* dia mengatakan:

“Seorang pakar hukum perundang-undangan mengatakan bahwa sistem parlementer tegak di atas pondasi tanggung jawab pemerintahan, kedaulatan rakyat dan penghargaan terhadap aspirasi mereka. Dalam sistem parlementer, tidak ada yang menghalangi persatuan dan kesatuan umat. Perpecahan dan konflik bukan termasuk prasyarat di dalamnya, kendati sebagian orang mengatakan bahwa salah satu tiang penyangga sistem parlementer adalah sistem kepartaian. Namun walaupun kepartaian telah menjadi tradisi, akan tetapi ia bukan merupakan pondasi bagi tegaknya sistem ini. Sebab sangat mungkin sistem parlemen dipraktikkan tanpa adanya partai, dan tanpa keluar dari kaidah-kaidah aslinya. Atas dasar ini, tidak ada kaidah-kaidah sistem parlementer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan dalam Islam dalam menata pemerinthahan. Itu berarti sistem parlemen tidak begitu jauh melenceng dan tidak asing bagi sistem Islam.”⁶²

Dari pemaparan di atas Al-Banna tampak memberikan komprominya terhadap sistem pemerintahan parlementer yang

⁶²Hasan Al-Banna , *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin jilid I*, h. 304-305

berjalan di Mesir pada saat itu. Ia mengkritisi sistem kepartaian yang dilaksanakan dalam sistem pemerintahan parlementer/modern, yang mengakibatkan perpecahan. Mengenai kekuasaan eksekutif, Al-Banna mengatakan kaidah-kaidah kekuasaan eksekutif (kabinet) dalam sistem pemerintahan parlementer juga tidak bertentangan dengan Islam. Bahwasannya kepala negara dalam Islam berhak mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada organisasi/lembaga apapun.

Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen, di sisi lain parlemen bertanggung jawab kepada Presiden / kepala Negara.⁶³ Dalam konsep Islam di masa lalu pendelegasian ini disebut dengan *wizarat al- tafwidh*,⁶⁴ ia juga mengutip penjelasan dari Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, mengenai sistem pemerintahan parlementer ini yang mendasarkan bolehnya pendelegasian pada firman Allah mengenai permohonan nabi Musa as: *“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu (menteri) dari keluargaku (yaitu) Harun saudaraku. Teguhkanlah dia dengan kekuatanku, dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku”* (QS. Thaha: 29-32). Jelas sekali sistim pemerintahan parlemen tidak bertentangan dengan Islam, jika Nabi saja diperbolehkan. Karena apa yang diserahkan kepada kepala negara untuk menjalankan kekuasaan eksekutif tidak akan mampu dilaksanakan seluruhnya secara profesional tanpa ada perwakilan. Mewakikan kepada menteri yang membantu itu lebih pas dan juga dapat menghindari dominasi kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

⁶³*Ibid*, h. 306.

⁶⁴*Wizaratut Tafwidh* adalah, sistim kabinet yang dipimpin oleh seorang menteri seperti sekarang ini.

7. *Konstitusi / Undang-Undang Dasar*

Demikian pula ketika menanggapi konstitusi/UUD Mesir, maka sikap Al-Banna menjadikan tiga pilar, yaitu tanggung jawab pemerintahan, kesatuan umat, menghargai aspirasi rakyat, yang terdapat dalam Nizhamul Hukum yang telah ia tentukan sebagai patokan untuk menilai baik buruknya. Setelah menilai sistem parlementer ia memberikan penilaian tentang UUD. Atas premis ini (setelah membahas sistem parlementer) dapat kita katakan dengan mantap bahwa kaidah-kaidah dasar yang menjadi tumpuan UUD Mesir tidak bertentangan (dengan Islam). Bahkan para tokoh yang menggodok UUD Mesir, walaupun bersandar pada prinsip-prinsip kontemporer dan teori perundang-undangan mutakhir, mereka sangat begitu hati-hati agar tidak ada satu butir pun dari undang-undang yang bertentangan dengan kaidah Islam.⁶⁵ Ada yang secara tegas tersurat sesuai dengan kaidah Islam seperti butir yang mengatakan “Agama Resmi Negara adalah Islam”.

Ada pula yang tersirat dan terbuka untuk ditafsirkan, namun dijamin tidak bertentangan dengan kaidah Islam, seperti butir Undang-undang (dasar) yang berbunyi “Kebebasan berkeyakinan itu dijamin undang-undang”.⁶⁶ Di bagian lain dari risalah *nizhamul hukkam* ini al-Banna memberikan kritiknya terhadap UUD Mesir, yang isinya mengenai kontradiksi-kontradiksi isi pasal dengan pasal lain, maupun isi pasal tertentu dengan sistem yang dianut dalam sistem pemerintahan parlementer yang berjalan di Mesir. Terlihat bahwasannya Al-Banna telah selesai dengan pembahasan benar tidaknya sistem konstitusional dalam pandangan Islam, ia justru menyelami, dalam pembahasannya, tentang apa yang harus

⁶⁵Hasan Al-Banna , *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin jilid I*, h. 304.

⁶⁶*Ibid*, h. 305.

diperbaiki dari UUD Mesir, yang artinya ia sendiri telah menerima penggunaan UUD. Akan tetapi dalam pandangannya syariat Islam / Islam harus dijadikan norma dasar acuan dalam pembuatan UUD.

8. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah sistem yang paling ditentang Al-Banna dalam pemikiran-pemikirannya, karena ia beranggapan bahwa dengan adanya sistem kepartaian, terutama yang membuka kesempatan bagi banyak partai untuk muncul, hanya akan memunculkan pertentangan dan perpecahan di masyarakat. Al-Banna justru mengambil contoh dari sistem kepartaian di Amerika yang membatasi hanya dua partai di pemilu (yaitu demokrat dan republik), Al-Banna lalu mengkritik partai-partai di Mesir yang dalam pandangannya hanya berorientasi kepada kekuasaan tapi tidak memberikan *platform* yang jelas mengenai Mesir.⁶⁷ Poin inilah yang dikritik al-Banna. Tampak bahwa yang dimaksudkannya adalah sistem kepartaian yang terjadi di Mesir pada saat itu. Dalam *risalah* ia mengatakan :

“Pada kenyataannya partai-partai di Mesir bukanlah partai sebagaimana yang dikenal berbagai negara di dunia. Ia tidak lebih dari sekedar rentetan konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat individual di tengah umat ini, yang pada suatu ketika mereka terkondisi untuk berbicara atas nama partai dan menuntut hak-haknya dengan mengatas namakan nasionalisme.”⁶⁸

Dalam analisis al-Banna, hal ini dimungkinkan karena sistem kepartaian pada saat itu justru tidak mengakomodir aspirasi dari

⁶⁷ *Ibid*, h. 260.

⁶⁸ *Ibid*, h. 310.

masyarakat Mesir, malah justru memecah belah masyarakat untuk mengikuti kemauan partai-partai yang ada, dan menimbulkan konflik kepentingan. Semua partai menerima negosiasi dengan penjajah. Mereka merubah format konflik dengannya. Negosiasi dengan penjajah dilakukan jika menguntungkan partai politik yang bersangkutan.⁶⁹ Memang, pada akhirnya Al-Banna menerima ide multi partai bila negara telah melalui fase pengokohan dan pembentukan. Ia mengatakan, "Jika suatu negara telah sempurna kedaulatannya dan telah menemukan jati dirinya, diperkenankan berbeda pendapat dan membentuk partai-partai dalam merumuskan permasalahan yang esensial. Akan tetapi ia tegaskan lagi multipartai tidak bisa diberlakukan di negara-negara yang baru tumbuh."⁷⁰

Dalam hal ini Al-Banna pada awalnya menolak sistim multipartai karena pada saat itu negara Mesir masih dalam fase perkembangan, masih dalam pengaruh pihak asing sehingga sangat rentan sekali terjadi konflik. Akan tetapi Al-Banna pada perkembangan selanjutnya menerima multipartai apabila negara sudah sempurna kedaulatannya.

9. Pemilu

Mengenai Pemilu, Al-Banna menganalogikan sistem pemilu sebagai sebuah cara untuk memilih wakil rakyat, dan merupakan salah satu bentuk dari penghargaan atas aspirasi rakyat. Dalam hal ini ia menyamakan bahwasannya kedudukan wakil rakyat ini sebagai *ahlu halli wal 'aqdi*, hanya saja untuk keperluan memilih *ahlu*

⁶⁹ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, hml. 148.

⁷⁰ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat*, h. 177.

halli wal 'aqdi, maka harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Di antara kreteria itu adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Ahli fiqih dengan standar mujtahid di mana pendapat-pendapat mereka dalam fatwa dan istinbath hukum diperhitungkan umat memiliki skill, pengalaman, pakar serta kemampuan dalam urusan publik.
2. Para tokoh kharismatik yang memiliki komando dan kepemimpinan di tengah masyarakat, seperti ketua suku, tokoh masyarakat, dan pemimpin organisasi.

Permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang banyak dibahas dalam permasalahan pemilu kontemporer yaitu diperlukannya kriteria-kriteria untuk calon wakil rakyat yang akan dipilih pada pemilu. Al-Banna pun mengkritik sistem pemilu di Mesir, mulai dari kualitas kerja KPU Mesir, hingga amandemen UU Pemilu Mesir untuk membuat kriteria calon yang pantas, aturan main dan rambu-rambu kampanye yang jelas, pelaksanaan yang baik, sanksi yang berat bagi setiap pelanggaran. Hanya saja Al-Banna justru menyarankan agar pemilihan calon dengan menggunakan gambar (partai) bukan memilih orang.⁷² Maksud Al-Banna adalah agar ketika mereka berhadapan dengan konstituen yang mereka perjuangkan bukanlah kepentingan pribadi mereka, namun kepentingan umum yang diartikulasikan melalui program partai politik mereka atau pun kelompok mereka.

F. Simpulan

Pada akhir Perang Dunia Pertama, pengaruh Ikhwan sangat besar di seluruh Mesir, sehingga *harakah* (gerakan) itu bisa disebut

⁷¹*Ibid*, h. 312.

⁷²*Ibid*, h. 314

sebagai pemerintahan dalam pemerintahan. Hampir tidak dijumpai kampung atau kota yang ada di Mesir melainkan terdapat cabang IM. *Fikrah* (pemikiran) dan *harakah* (pergerakan) ini telah tersebar ke sekolah-sekolah, masjid-masjid dan pusat-pusat kebaikan seluruh Mesir. Majalah, *risalah*, surat kabar, dan buku-buku mereka tersebar luas. Bukan hanya itu pengaruh IM tersebar luas hingga di luar negara Mesir. Pemuda-pemuda di negara-negara Islam mulai membuka Cabang IM di Syria, Libanon, Yordania, Palestina, Irak dan lain-lain. Pengaruh IM di seluruh dunia masa terasa getarannya hingga kini. Para aktivisnya ingin mewujudkan secara nyata konsep dasar IM didirikan. Tujuan didirikan IM adalah untuk membangun masyarakat dan negara Islam yang menjalankan undang-undang Islam. Al-Banna berkata: "Kita tidak akan berdiam diri dan merasa senang atau berhenti selagi Alqur'an belum benar-benar menjadi perlembagaan negara. Kita akan hidup untuk mencapai tujuan ini atau mati karenanya".⁷³

Dalam pemikiran politiknya, Hasan Al-Banna menghubungkan antara akidah dengan aktivitas politik. Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politikus, yang mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian yang penuh terhadap persoalan umat. Keislaman seseorang menuntunnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya. Islam adalah sistem yang *syamil* (menyeluruh), mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka ia adalah negara dan tanah air atau pemerintahan, umat, moral, kekuatan, atau kasih sayang dan keadilan, wawasan dan undang-undang, atau ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam atau penghasilan dan kekayaan, serta jihad dan dakwah atau

⁷³Hasan Al-Banna, *Risalah I*, h. 56

pasukan dan pemikiran. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang murni dan benar, tidak kurang tidak lebih. Ruang lingkup dari Islam itu sendiri tidak memungkinkan untuk tidak menyentuh lingkup politik dan negara. Hal ini juga terkait dengan aturan dalam Islam itu sendiri yang mengatur urusan-urusan yang memerlukan kekuasaan sebagai pelaksananya.

Pemikiran Hasan al-Banna telah menjalar kemana-mana sehingga sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Al-Banna juga telah melahirkan banyak ulama dan pemikir: seperti: Dr. Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Sayyid Hawa, dan banyak lagi. Kini, Ikhwan al-Muslimin hadir dalam satu khazanah baru pergerakan dan keilmuan yang membawa arus modernisasi keislaman, meskipun di sisi lain dipandang sebagai wadah terbentuknya “radikalisme Islam”.

Daftar Pustaka

- Al-Banna, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid I*, Solo: Era Intermedia, , 2005.
- . *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid II*. Jakarta: Era Intermedia, 2005.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid. *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat*. Jakarta: Al-I'tishom, 2001.
- As-Siisi, Abbas. *Bersama Kafilah Ikhwan Jilid 1*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat. 2005.
- Amstrong, Karen. *Berperang Demi Tuhan*, terj. Satrio Wahono, dkk. Jakarta: Serambi, 2002.

Damitri, Adib. "As-Simat al-Asasiyah li al-Harakah al-Islamiyah fi Misr", dalam *Al-Ushuliyat al-Islamiyyah fi 'Asrina al-Rahin*, Kairo: Qadayah Fikriyyah, 1993.

Hunter, T. Shireen. "Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan, terj. Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

Hanafi, Hassan. *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayanti, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Esposito, John L. dan John J. Donuhue. *Islam Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Lenczowski, George. *Timur Tengah di Kancah Dunia*, terj. Asgar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993.

Mahmud, Ali Abdul Halim. *Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu Jilid I dan II*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

----- . *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia, 1999.

Mansyhur, Syaikh Mushthafa. *Fiqh Dakwah Jilid 1*. Jakarta: Al-'tishom, 2000.

Muhammad, Thahan Musthafa. *Pemikiran Moderat Hasan Al-Banna*. Bandung: Harkatuna Publishing, 2007.

Rais, Dhia'uddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ruslan Utsman, Abdul Mu'iz. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*.

Solo: Era Intermedia, 2000.

Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Yakan, Fathi. *"Revolusi" Hasan Al-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Qutb sampai Rasyid Al-Ghannusyri*, terj. Fauzun Jamal dan Alimin, Bandung: Harakah, 2002.

www.http://perisaidakwah.com, sepeinggal kenangan bersama ustadz. Hasan Al Banna, 12 Agustus 2007.

www.<http://abatihawa.blogspot.com/2008/07/hassan-al-banna-dan-ikhwanul-muslimin.html> Al-Ikhtwan.

www.http://yusranrahman.multiply.com.

